

LAPORAN TESIS

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN DIAGNOSIS OLEH DOKTER SPESIALIS ANAK PADA LAYANAN TELEMEDISIN



Oleh :

SUSY PUTRI WIHADI

NIM : 21.C2.0083

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

LAPORAN TESIS

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN DIAGNOSIS OLEH DOKTER SPESIALIS ANAK PADA LAYANAN TELEMEDISIN

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan



Oleh :

SUSY PUTRI WIHADI
NIM : 21.C2.0083

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Setiap warga negara Indonesia termasuk anak memiliki hak atas layanan kesehatan. Namun jumlah dokter dan dokter anak belum memadai dan sebarannya belum merata di seluruh area Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, layanan telemedisin merupakan salah satu alternatif solusi. Layanan telemedisin di Indonesia, termasuk di bagian kesehatan anak, berkembang pesat terutama sejak terjadinya pandemi COVID. Tetapi dilain pihak peraturan mengenai layanan telemedisin terutama di bidang kesehatan anak belum memadai. Pelindungan hukum dalam penegakkan diagnosis oleh dokter spesialis anak dalam layanan telemedisin belum jelas. Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana peraturan terhadap pelindungan hukum, pelaksanaan pelindungan hukum serta faktor faktor yang berpengaruh terhadap pelindungan hukum dalam penegakkan diagnosis oleh dokter spesialis anak dalam layanan telemedisin. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data didapatkan dengan melakukan wawancara kepada dokter spesialis anak (DSA) yang merupakan anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) di wilayah Bogor, Depok dan Sukabumi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peraturan pelindungan hukum dan pelaksanaan pelindungan hukum berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024 belum memadai karena peraturan menteri untuk melengkapi syarat pelindungan hukum bagi DSA dalam menegakkan diagnosis pada layanan telemedin belum ada. Begitu juga dengan pelaksanaan pelindungan hukum preventif belum bisa diterapkan karena peraturan pelaksana yang belum lengkap. Faktor faktor yang mempegaruhi pelindungan hukum tersebut berupa faktor yuridis, infrastruktur dan sosial juga memiliki kontribusi tersendiri. Dengan demikian diharapkan pemerintah dapat segera menyusun peraturan turunan untuk mengatur hal tersebut.

Kata kunci: pelindungan hukum, penegakkan diagnosis, dokter spesialis anak, telemedisin

ABSTRACT

Every Indonesian citizen, including children, has the right to health services. However, the number of doctors and pediatricians is not sufficient, and the distribution is not evenly distributed throughout Indonesia. To overcome this, telemedicine services are one of the alternative solutions. Telemedicine services in Indonesia, including in the child health sector, have grown rapidly, especially since the COVID pandemic. But on the other hand, regulations regarding telemedicine services, especially in the field of child health, are inadequate. Legal protection in the enforcement of diagnoses by pediatricians in telemedicine services is unclear. This study is aimed at looking at how regulations on legal protection, the implementation of legal protection and factors affect legal protection in the enforcement of diagnoses by pediatricians in telemedicine services. This research was conducted with a sociological juridical approach. The data was obtained by conducting interviews with pediatricians who are members of the Indonesian Pediatric Society (IPS) in the Bogor, Depok and Sukabumi areas. The results of the study show that legal protection regulations and the implementation of legal protection based on Law No. 17 of 2023 and Government Regulation No. 28 of 2024 are inadequate because ministerial regulations to complete the legal protection requirements for DSA in establishing diagnoses in telemedicine services do not yet exist. Likewise, the implementation of preventive legal protection cannot be implemented because the implementing regulations are incomplete. The factors that affect legal protection in the form of juridical, infrastructural and social factors also have their own contributions. Thus, it is hoped that the government can immediately prepare derivative regulations to accommodate these problems.

Keywords: legal protection, diagnosis making, pediatrician, telemedicine